

Model dan Kelembagaan Pengelolaan Ekosistem Gambut Berkelanjutan Papua Barat

Obed Nedjo Lense

Fakultas Kehutanan Universitas Papua, Manokwari, Papua Barat 98314, Indonesia

Disampaikan pada:

Lokakarya Proyek Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan Pasifik Barat (Western Pacific Sustainable Peatland Management-SAGU) Provinsi Papua Barat

SwissBell Hotel Manokwari, 26 Juli 2022

Abstrak

Papua Barat memiliki luasan ekosistem gambut kurang lebih 1,4 juta ha yang tersebar di Sembilan Kabupaten, yaitu Teluk Bintuni, Sorong Selatan, Kaimana, Fak-Fak, Sorong, Teluk Wondama, Raja Ampat dan PegAf. Kawasan ekosistem gambut tersebut mengambil porsi kurang 8% dari seluruh tutupan lahan di Papua Barat. Luasan ekosistem gambut tersebut terdiri dari dua fungsi ekosistem, yaitu fungsi lindung (39%) dan fungsi budidaya (61%). Semua lokasi Kabupaten yang memiliki ekosistem gambut terdapat dua fungsi ekosistem gambut tersebut dengan proporsi yang berbeda-beda antara satu Kabupaten dengan Kabupaten lainnya. Berdasarkan *hydrogeomorphic setting*, ekosistem gambut Papua Barat terdiri dari dua tipe, yaitu lahan gambut (*peatland*) dengan vegetasi dominan *non-mangrove* dan Gambut Bakau (*mangrove peat*) dengan vegetasi dominan bakau. Dari aspek tipe, kedalaman dan kematangan, gambut Papua Barat Sebagian besar masuk dalam tipe gambut mineral dengan tingkat kematangan rendah (hemis) dengan kedalaman berkisar antara 50-100 cm. Beberapa hasil Penelitian menunjukkan bahwa ekosistem gambut Papua Barat memiliki simpanan karbon (*c-stock*) yang sangat tinggi, terutama pada ekosistem gambut bakau. Total simpanan karbon ekosistem gambut Papua Barat berkisar antara 1400 – 1900 t C ha⁻¹ dengan rata-rata 1480 t C ha⁻¹. Dengan kondisi gambut seperti ini, pengelolaan ekosistem gambut Papua Barat direkomendasikan menganut beberapa prinsip, yaitu berbasis keilmuan (*science*) dan kearifan local (*local wisdom*), terpadu (*integrated*), bijaksana, berkelanjutan, serta adil dan mandiri. Sedangkan pendekatan pembentukan kelembagaan pengelolaan yang disarankan adalah pendekatan tata ruang dan berbasis ekosistem. Selanjutnya untuk model kelembagaan yang direkomendasikan adalah model kelembagaan multi-pihak (*multi-stakeholders institution*) dengan prinsip-prinsip: bekerja bersama, sinergitas, partisipatif, pemberdayaan masyarakat, desentralisasi, pengembangan sistem manajemen, serta pembagian peran (tidak tumpang tindih/berebut peran antar Lembaga).

Key words: ekosistem gambut, pengelolaan, kelembagaan, multi-pihak, Papua Barat